

344.046
Jsy
P 01

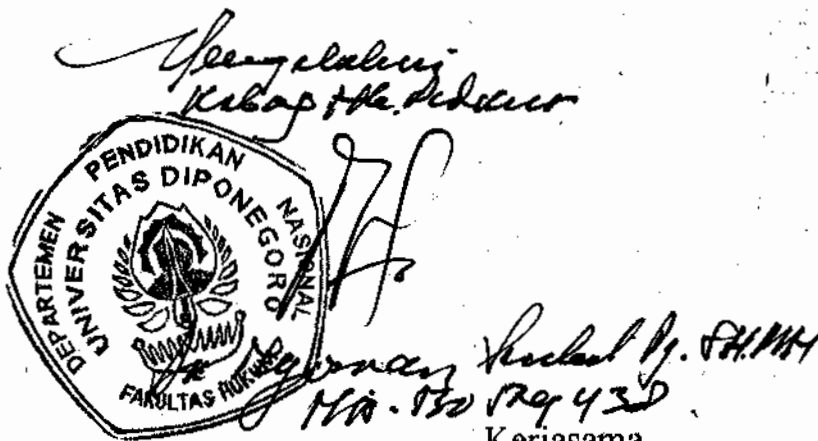
PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Makalah

Disampaikan dalam Dialog Interaktif Hukum Lingkungan dengan tema
"Limbah MT. VIKING / MV. STEAD FAST Tanggung Jawab Siapa"

Oleh :

Nyoman Serikat Putra Jaya , SH. MH.



Kerjasama

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Aliansi LSM di
Kampus Universitas Pancasakti Tegal

29 Maret 2001

PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Oleh : Nyoman Serikat Putra Jaya

Dalam rangka diselenggarakannya dialog interaktif dengan tema : “**LIMBAH STEAD FAST , TANGGUNG JAWAB SIAPA**” , oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal , kami oleh Dekan diminta untuk bertindak sebagai pembicara dengan sub tema “**Pertanggungjawaban Dalam Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Pidana**” . Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk ikut ambil bagian dalam dialog interaktif ini dengan menyumbangkan pokok-pokok pikiran sesuai dengan bidang keahlian kami yaitu hukum pidana . Sebelum kami memberikan pokok-pokok pikiran kami , perkenankan kami membagi uraian kami ini ke dalam 2 (dua) sub bab yaitu (a) **Pertanggungjawaban Dalam Pencemaran Lingkungan Secara Umum** , dan (b) **Pertanggungjawaban Dalam Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Pidana** .

A. Pertanggungjawaban Dalam Pencemaran Lingkungan Secara Umum

Pemerintah bersama-sama DPR telah berhasil menelurkan Undang-Undang No : 23 Tahun 1997 , yang menggantikan Undang-Undang No: 4 Tahun 1982 Tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup” disingkat UU-PLH . Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 12 UUPH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup , zat , energi , dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia , sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya “ . UUPH juga memberikan pengertian mengenai sengketa lingkungan hidup , sesuai dengan Pasal 1 angka 19 yang menentukan bahwa “sengketa lingkungan hidup” adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya , diduga adanya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup “ .

Apabila terjadi sengketa lingkungan hidup UUPLH menyediakan 3 sistem sanksi, ialah sistem sanksi administratif, sistem sanksi perdata dan sistem sanksi pidana. Sengketa lingkungan hidup yang bukan merupakan tindakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UUPLH dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Jalur melalui pengadilan dilaksanakan dengan cara mengajukan gugatan perdata dengan dasar Pasal 1365 BW, dimana harus dipenuhi beberapa syarat ialah (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) harus ada kesalahan pada si pelaku, (3) harus ada kerugian, dan (4) harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Namun yang harus diperhatikan bahwa Pasal 1365 BW mengandung konsep "tanggung gugat berdasarkan kesalahan" atau "liability based on fault". Dengan adanya konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini, sangat tidak menguntungkan pihak-pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban pencemaran, karena berada pada pihak yang lemah baik dari aspek hukum (pembuktian adanya kesalahan) maupun dari aspek sosial ekonomi, yang pada umumnya masyarakat kecil yang berada pada posisi sosial yang lemah, berhadapan dengan satu atau sejumlah pencemar dengan kedudukan ekonomi yang tangguh. Oleh karena itu, Pasal 35 UUPLH memberikan jalan ke luar dengan adanya "tanggung jawab mutlak". Tanggung jawab mutlak dalam kepustakaan sering juga disebut "strict liability". Namun tanggung jawab mutlak ini hanya terbatas pada usaha atau kegiatan yang : (1) menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan (2) menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Adanya tanggung jawab mutlak ini, merupakan "lex specialist" dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya, yang terkenal dengan asas "liability based on fault".

UUPLH juga memberikan hak kepada masyarakat maupun Organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan, yaitu hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. Gugatan perwakilan ini sering juga disebut "class action". Organisasi Lingkungan Hidup yang

mengajukan gugatan , dibatasi tidak boleh adanya tuntutan ganti rugi , kecuali biaya dan pengeluaran riil .

UUPLH memberikan kriteria bagi Organisasi Lingkungan Hidup yang dapat mengajukan gugatan yaitu (a) berbentuk badan hukum atau yayasan , (b) dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup , dan (c) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya . Sedangkan isi tuntutan dapat berupa : (a) memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup , (b) menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup , dan (c) memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolahan limbah . Sedangkan tindakan hukum tertentu , misalnya : memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan , memulihkan fungsi lingkungan hidup , dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan / atau kerusakan .

Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan , para pihak (yang mengalami kerugian dan yang mengakibatkan kerugian) , dapat menggunakan jasa pihak ke tiga yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bertindak sebagai "fasilitator" dan harus memenuhi syarat-syarat : (a) disetujui oleh para pihak yang bersengketa , (b) tidak memiliki hubungan keluarga dan / atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa , (c) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan , dan (d) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya . Sedangkan pihak ke tiga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan , bertindak sebagai arbiter dan semua keputusan arbitrase bersifat tetap dan mengikat pihak yang bersengketa .

B. PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Secara yuridis tindak pidana lingkungan termasuk tindak pidana administratif atau “administrative penal law”, dan disebut juga tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat atau “public welfare offences”. Yang penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tga permasalahan pokok dalam hukum pidana itu dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai fungsi untuk melakukan rekayasa sosial atau “social engeneering”, yaitu yang meliputi (1) perumusan tindak pidana (“criminal act”), (2) pertanggung-jawaban pidana (“criminal responsibility”), dan (3) sanksi (“sanction”) baik yang berupa pidana (“punishment”) maupun tindakan tata tertib (“treatment”).

Dalam konotasi politik, tindak pidana lingkungan hidup dapat disebut “white collar crime”, karena tindak pidana lingkungan hidup dapat digolongkan dalam tindak pidana ekonomi atau “economic crime”. Dalam pengertian sosial disebut “socio economic crime”.

Hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian dalam hal terjadi pencemaran lingkungan adalah masalah korban dari pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri. Masalah korban dalam tindak pidana lingkungan merupakan masalah yang sulit untuk ditentukan secara seketika.

Yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan :

- a. kepentingan negara atau kepentingan masyarakat.
- b. manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik maupun mental
- c. perusahaan pesaing yang taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya besar.
- d. karyawan yang bekerja pada suatu lingkungan yang tidak sehat.

UUPLH nampaknya dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan hidup, di samping menggunakan sanksi administratif dan sanksi perdata juga menggunakan sanksi pidana. Sanksi pidana dalam UUPLH terlihat dalam Pasal 41 sampai Pasal 48.

Pasal 41 :

(1) ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah .

Perbuatan yang dilarang : secara melawan hukum , sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup .

(2) ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah , jika mengakibatkan mati atau luka berat .

Pasal 42 :

(1) ancaman pidana paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah .

Perbuatan yang dilarang : karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup .

(2) ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah , jika mengakibatkan orang mati atau luka berat .

Pasal 43 :

(1) ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah .

Perbuatan yang dilarang : dengan melanggar peraturan yang berlaku , dengan sengaja melepaskan atau membuang zat , energi , dan / atau komponen lain yang berbahaya atau beracun , masuk di atas atau ke dalam tanah , ke dalam udara atau ke dalam air permukaan , melakukan impor , ekspor , memperdagangkan , mengangkut , menyimpan bahan tersebut , atau menjalankan instalasi yang berbahaya , padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain .

(2) ancaman pidana sama dengan ayat (1) .

Perbuatan yang dilarang : dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan

dalam kaitannya dengan perbuatan seperti ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

- (3) ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 450 juta rupiah, jika perbuatan dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Pasal 44 :

- (1) ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah.

Perbuatan yang dilarang : melanggar ketentuan undang-undang karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) ancaman pidana menjadi paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 150 juta rupiah, jika mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Pasal 45 :

Menentukan sanksi pidana untuk badan hukum yaitu pidana denda untuk masing-masing tindak pidana ditambah 1/3.

Pasal 46 :

- (1) tuntutan pidana dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan pada badan hukum, atau mereka yang memberi perintah, atau pinjaman tanpa mengingat apakah mereka ada hubungan kerja atau hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (2) syarat badan hukum melakukan tindak pidana lingkungan yaitu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum.
- (3) surat panggilan dan penyerahan surat panggilan di tempat tinggal pengurus atau tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.
- (4) badan hukum diwakili oleh orang lain dan hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47 :

Mengatur sanksi kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup , di samping pidana seperti dalam KUHP , juga dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan / atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan , dan / atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana , dan / atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak , dan / atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak , dan / atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun .

Pasal 48 :

Tindak pidana dalam UUPH adalah kejahatan

Dari apa yang telah diuraikan di atas , maka dilihat dari aspek hukum pidana , apabila terjadi pencemaran lingkungan , maka pelaku pencemaran baik sebagai subjek berupa manusia ataupun badan hukum . Sedangkan pertanggung jawaban dari aspek hukum pidana juga dapat dimintakan kepada pelaku baik perorangan , bersama-sama maupun terhadap badan hukumnya sendiri atau kedua-duanya . Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat berupa pidana penjara , denda atau tindakan tata tertib . Sedangkan pidana penjara dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda

Demikian sekelumit uraian mengenai "Pertanggung Jawaban Dalam Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Pidana" , semoga dapat dijadikan bahan untuk dialog pada kesempatan ini .

-----000000000000-----

DAFTAR PUSTAKA

- United Nations , Preliminary Report : Environmental Crime , Sanctioning Strategis and Sustainable Development , Commission on Crime Prevention and Criminal Justice , Vienna , 21-30 April 1992 , (Doc . E / CN 115 / 1992 / CRP 4)
- _____ , Human Right and the Environment , Doc . E / CN . 4 / Sub . 2 / 1994 , 6 July 1994 .
- _____ , Report of the Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of the Offenders , Cairo , 29 April - 8 May 1995 , (Doc . A / Conf . 169 / 16 , 16 May 1995)
- Muladi , Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan UU No . 23 Tahun 1997 .
- Nyoman Serikat Putra Jaya , Kapita Selekta Hukum Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang , 2001 .
- Undang-Undang No . 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .

UPT-PUSTAK-UNBIP